

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022

Oleh : Fabian Arbi

Pembimbing: Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.I.P.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022. Sebagai bentuk Implementasi dari Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan WaliKota Pekanbaru No. 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Dan Penurunan *Stunting*. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Tim Khusus dalam menangani permasalahan *stunting* yang ada di Kota Pekanbaru, dan nama tim tersebut adalah (TPPS) Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Adapun masalah dari penelitian ini adalah meningkatnya angka *stunting* di Kota Pekanbaru dari 11,4% pada tahun 2021 menjadi 16,8% pada tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan data sekunder yaitu data penunjang atau memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ada 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* belum berjalan dengan maksimal, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti tidak ada (STRAKOM) Strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan kurang maksimalnya sosialisasi yang berdampak kepada masyarakat yang masih banyak belum mengetahui apa itu *stunting*, kemudian tidak sedikit masyarakat yang menganggap remeh *stunting* dan adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, *Stunting*

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of Presidential Regulation no. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting in Pekanbaru City in 2021-2022. As a form of implementation of Presidential Regulation no. 72 of 2021, the Pekanbaru City Government issued Pekanbaru Mayor Regulation no. 134 of 2021 concerning the Convergence of Accelerating Prevention and Reducing Stunting. The regulation explains that the Pekanbaru City Government has formed a Special Team to handle the stunting problem in Pekanbaru City, and the name of the team is (TPPS) Stunting Reduction Acceleration Team. The problem of this research is the increasing stunting rate in Pekanbaru City from 11.4% in 2021 to 16.8% in 2022.

This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. There are 4 stages of data analysis techniques used, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this research indicate that the Implementation of the Policy for Accelerating Stunting Reduction has not been running optimally, there are influencing factors such as the absence of (STRAKOM) strategies that the Pekanbaru City Government has, causing less than optimal socialization which has an impact on the community, many of whom still don't know what it is. stunting, then quite a few people underestimate stunting and the limited funds owned by the Pekanbaru City Government.

Keywords: Implementation, Policy, Government, Stunting

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Stunting pada saat ini sudah menjadi permasalahan yang serius baik bagi nasional maupun *international*¹. *Stunting* dapat menjadi ancaman bagi masa depan suatu negara karena dapat mengganggu pertumbuhan pada anak-anak sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara di masa yang akan datang. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan linear dalam status gizi rendah yang dapat diartikan sebagai kondisi pada seseorang dengan tubuh pendek atau sangat pendek kerana malnutrisi². Dikarenakan dampak dari *Stunting* dapat mengancam masa depan suatu bangsa, oleh sebab itu *Stunting* menjadi suatu permasalahan yang sangat serius.

Masalah *stunting* bukan semata persoalan tinggi badan, namun dampak lain yang dapat ditimbulkan akibat *stunting* yaitu masalah perkembangan otak, sistem kekebalan dan dampak lebih lanjutnya adalah, kemerosotan kapabilitas, penurunan kognitif, hambatan motorik,

penurunan produktivitas dan meningkatnya risiko penyakit kronis³. Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami *stunting*, dimana 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita *stunting* adalah balita Indonesia (Eko, 2023). Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita *stunting* pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 26,9% (Umam, 2023).

Melihat tingginya angka *stunting* yang ada di Indonesia pada tahun 2020 dan mengingat dampak besar yang ditimbulkan akibat *stunting* yang dapat mengancam Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting*. Maksud dengan percepatan penurunan *stunting* adalah sebuah program yang akan menjadi strategi nasional untuk menangani permasalahan *Stunting* yang ada di Indonesia. Program tersebut juga merupakan salah satu program prioritas

¹ Rosha, B., Susilowati, A., Amaliah, N. and Permanasari, Y. (2020). *Risiko Penyebab Kejadian Stunting pada Anak*. Buletin Penelitian Kesehatan, 48(3), 169–182

² Nasikhah, R., & Margawati, A. (2012). Prevalensi *stunting* di Jawa Tengah kejadian tertinggi di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Nutrition College*, 1(1), 176–184. Ejournal-s1.undip.ac.id

³ Setiawan, E., Machmud, R., & Masrul, M. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Stunting* pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i2.813>

pemerintah yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dimana merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga itulah mengapa permasalahan *stunting* ini merupakan permasalahan yang sangat serius.

Berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 72 tahun 2021 pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) tentang target dan tujuan dari strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*, menunjukkan program pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* yang ada di pusat, provinsi, Kota atau kabupaten dan desa, dapat melibatkan aktor dari sektor lain untuk membantu mengatasi permasalahan *stunting* di wilayahnya masing-masing. Salah satu contoh wilayah atau daerah yang sudah melakukan penerapan tersebut adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu Kota dari provinsi Riau yang terletak di pulau Sumatra.

Adapun perbandingan kondisi *stunting* Kota Pekanbaru dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prevalensi Balita Stunting Provinsi Riau 2018-2022

Kabupaten/ Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022
Kuantan Singigi	24,6%	29,55%	22,4%	17,8%
Indragiri Hulu	32,2%	29,76%	23,6%	16,7%
Indragiri Hilir	32,2%	27,43%	28,4%	28,5%
Pelalawan	25,5%	22,97%	21,2%	11,2%
Siak	21%	27,79%	19%	22%
Kampar	32,1%	23,07%	25,7%	14,5%
Rokan Hulu	27,3%	24,7%	25,8%	22%
Bengkalis	32,3%	21,07%	21,9%	8,4%
Rokan Hilir	38,1%	28,78%	29,7%	14,7%
Kepulauan Meranti	29,9%	25,1%	23,3%	17,5%

Pekanbaru	16%	18,58%	11,4%	16,8%
Dumai	17,9%	11,59%	23%	12,8%
Jumlah	27,4%	23,95%	22,3%	17%

Sumber: SSGI, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan angka *Stunting* di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) survei yang dilaksanakan oleh kementerian kesehatan (KEMENKES), yaitu pada tahun 2018 *stunting* di Kota Pekanbaru sebesar 16% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 18,58%. Sementara pada tahun 2020 survei tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Indonesia sedang menghadapi pandemi covid-19 sejak bulan Maret 2020. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 *stunting* Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar 11,4% hasil tersebut sangat bagus karena sudah mencapai target nasional yakni 14% bahkan dibawah rata-rata, namun sangat disayangkan pada tahun 2022 prevalensi angka *Stunting* di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan kembali sebesar 16,8%. Hasil diatas adalah hasil survei menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dimana angka itu didapatkan dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan (KEMENKES), dan berikut adalah data *stunting* hasil dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2020. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data *Stunting* Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah <i>Stunting</i>
1.	Bukit Raya	85
2.	Tenayan Raya	231
3.	Rumbai	21
4.	Rumbai Pesisir	108
5.	Payung Sekaki	69
6.	Marpoyan Damai	67
7.	Sukajadi	23
8.	Senapelan	5

9.	Sail	62
10.	Pekanbaru Kota	22
11.	Tampan	75
12.	Lima Puluh	101
Jumlah		869

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Pada Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwasannya jumlah *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 adalah sebesar 869 kasus *stunting*, dan angka *stunting* tertinggi pada kecamatan Tenayan Raya sebesar 231 dan angka terendah pada kecamatan Senapelan yakni diangka 5. Hasil diatas adalah jumlah *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 yang diperoleh dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada di setiap kecamatan Kota Pekanbaru dan jumlah kecamatan Kota Pekanbaru pada tahun 2020 adalah sebanyak 12 kecamatan, pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2020 melakukan pemekaran wilayah pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2020, setelah melakukan pemekaran wilayah jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 15 kecamatan, dan pada tabel 1.3 berikut adalah *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022 setelah dilakukannya pemekaran wilayah:

Tabel 1.3 Data *Stunting* Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah <i>Stunting</i>	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Payung Sekaki	26	22
2.	Bukit Raya	15	16
3.	Marpoyan Damai	15	24
4.	Tenayan Raya	31	55
5.	Lima Puluh	76	60
6.	Sail	12	7
7.	Pekanbaru Kota	5	5

8.	Sukajadi	26	12
9.	Senapelan	3	3
10.	Rumbai	23	24
11.	Binawidya	25	8
12.	Kulim	2	9
13.	Rumbai Timur	8	6
14.	Rumbai Barat	30	33
15.	Tuah Madani	6	34
Jumlah		303	318

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Tabel 1.3 menunjukkan data *stunting* dari setiap kecamatan yang ada di Kota pekanbaru setelah pemekaran wilayah. Terdapat 621 kasus *stunting* pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021-2022. Jika dilihat dari kasus pertahunnya, tahun 2022 mengalami kenaikan kasus sebanyak 18 kasus dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 hanya 303 kasus di Kota pekan baru tetapi di tahun 2022 ada 318 kasus, dan dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, kasus *stunting* tertinggi berada di kecamatan Lima Puluh sebesar 76 kasus *stunting* dan yang terendah terletak pada kecamatan Kulim yang berada di angka 2, dan pada tahun 2022 kasus *stunting* tertinggi masih di pegang oleh kecamatan Lima Puluh yakni sebesar 60 kasus, dan yang terendah terletak pada kecamatan Senapelan yang berada di angka 3 kasus *stunting*.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Pekanbaru cukup mengalami kesulitan dalam menangani *stunting* di wilayahnya, dimana terjadinya kenaikan angka *stunting* yang dimana sebelumnya sudah terjadi penurunan, meskipun cukup sulit Kota Pekanbaru mampu membuat angka *stunting* mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 sebanyak 303 kasus *stunting*, yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni tahun 2020 sebanyak 869 kasus *stunting*, hal tersebut terjadi karena pemerintah Kota Pekanbaru telah meneruskan

amanat dari Presiden yang tercantum pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* melalui Peraturan WaliKota Pekanbaru (PERWAKO) No. 134 Tahun 2021 tentang konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. Namun, pada tahun berikutnya yakni tahun 2022 angka *stunting* di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dari 303 kasus *stunting* menjadi 318 kasus *stunting*.

Sementara jika berdasarkan hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka *stunting* Kota pekanbaru mengalami kenaikan sebesar 16,8% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 11,4%, jika dilihat dari target nasional, angka *stunting* yang ingin dicapai adalah sebesar 14%, Kota Pekanbaru sudah berhasil mencapai bahkan melebihi dari target nasional pada tahun 2021 namun sayangnya hal tersebut hanya bertahan 1 tahun, fenomena ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *stunting* dan karena kurangnya sosialisasi dalam skala besar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam sosialisasi, saat ini sosialisasi hanya dilakukan dalam skala kecil, seperti rumah kerumah, dan poster di setiap fasilitas kesehatan.

Maka dari itu Pemerintah Kota Pekanbaru harus melihat kembali permasalahan apa saja yang dihadapi maupun yang akan dihadapi atau apa saja faktor-faktor penghambat seperti, anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain. Hal itu dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat membantu penurunan angka *stunting* dan kebijakan yang dibuat bisa diimplementasikan dengan baik sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dan mendapatkan hasil yang maksimal dari sebelumnya, oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih baik lagi dalam membuat kebijakan dan

mengimplementasikannya untuk menghadapi permasalahan *stunting* ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan yang akan dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022?
2. Mengapa prevalensi *stunting* Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2022?

Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 2 tahun terakhir 2021-2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenaikan angka *stunting* di Kota Pekanbaru dari tahun 2021 sampai tahun 2022.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintah terutama kajian mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan penurunan angka *stunting* di Kota Pekanbaru.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan wawasan mengenai kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kota Pekanbaru.

2. TINJAUAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Purwanto⁴ mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Meter dan Horn 1975 dalam (Ayuningtyas, 2018) mengatakan bahwa implementasi kebijakan juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan Edwards George III. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Menurut Edward George III dalam (Wahab, 2014) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Penanggulangan *Stunting*

Kejadian balita *stunting* dapat diputus mata rantainya sejak janin dalam kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, artinya setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, mendapatkan suplementasi zat gizi (tablet Fe), dan terpantau kesehatannya. Selain itu setiap bayi baru lahir hanya mendapat ASI saja sampai umur 6 bulan (eksklusif) dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan

kualitasnya. Ibu nifas selain mendapat makanan cukup gizi, juga diberi suplementasi zat gizi berupa kapsul vitamin A.

Upaya pemerintah dalam mengatasi *stunting* dapat dilakukan dengan intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi *stunting*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya menurut Edward George III. Berdasarkan hasil analisis implementasi percepatan penurunan *stunting* oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan menjadi kriteria penting dalam

⁴ Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip Dan Aplikasi* (Ed. 1, Cet). Depok: Rajawali Pers.

menemukan bagaimana implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberi pemahaman atau bahkan penjelasan tujuan kepada kelompok sasaran maka akan terjadi penolakan dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu di dalam tahap komunikasi diperlukan adanya tiga hal, yaitu: (1) Penyaluran (koordinasi atau transmisi); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan; Dan (3) adanya konsistensi informasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah dan tidak ada kejelasan dari pimpinan akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan prasarana dalam menjalankan suatu kebijakan. Karena apabila sumber daya manusia sudah berkualitas tetapi sumber daya fasilitas sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk mendukung sumber daya manusianya dalam melakukan suatu tindakan, hal ini juga tidak bisa sinkron dan tentunya tidak memiliki hasil yang optimal dalam pelaksanaannya. Faktor sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Untuk melihat sejauh mana sumber daya manusia berjalan dengan efektif akan dilihat dari Staff/ pegawai kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh

staf/pegawai yang tidak memadai dan tidak kompeten dibidangnya.

3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana (Disposisi)

Disposisi adalah sebuah sikap atau tindakan yang diambil sebuah lembaga pemerintahan maupun perorangan, dikarenakan sikap ini sangat menentukan masa depan Negara maupun masyarakat sekitarnya yang ada, untuk itu diperlukan sikap atau langkah yang ingin diambil untuk keberlangsungan sebuah kelompok maupun perorangan, maka dari itu apabila salah dalam mengambil suatu keputusan makan berakibat buruk untuk sebuah kelompok atau perorangan nanti kedepannya. Dalam hal ini jika para pelaksana kebijakan bersikap baik dan mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaan kebijakan akan maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

4. Struktur Organisasi

Birokrasi merupakan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan demikian juga halnya dengan adanya kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru harus memiliki struktur birokrasi yang baik. Dari birokrasi ini ada dua karakteristik utama yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar (*Operating Procedur*).

4.2. Kenaikan Prevalensi *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

4.2.1. Tidak Adanya Strategi Komunikasi (STRAKOM)

Dalam rentan waktu 2 tahun antara 2021 hingga 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya melakukan sosialisasi di PUSKESMAS, POSYANDU dan per individu, tidak ada sosialisasi dalam skala *massive* (Luas/Besar). Sedangkan penduduk Kota Pekanbaru sangat banyak dan wilayah yang dimiliki Kota Pekanbaru sangat luas, sehingga membutuhkan sosialisasi dalam skala *massive* (Luas/Besar) untuk menjangkau

area yang luas dan penduduk yang banyak.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh *Technical Assistant* satgas *stunting*, Pemerintah Kota Pekanbaru belum mempunyai (STRAKOM) dan masih melakukan sosialisasi dalam skala kecil. Sedangkan penduduk yang dimiliki Kota Pekanbaru sangatlah banyak dan wilayahnya sangatlah luas. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya (STRAKOM) ini sangat mempengaruhi naiknya angka *stunting* di Kota Pekanbaru, karena masih banyak yang masyarakat yang belum mengetahui apa itu *stunting*.

4.2.2. Keterbatasan Dana

Untuk aliran dana Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menggunakan (APBD) melainkan (APBN). Seperti pada tahun 2022 anggaran yang tersedia untuk *stunting* adalah Rp. 45.933.084.571, hal tersebut peneliti dapatkan dari Dinas BAPPEDA. Keterbatasan dana menjadi faktor penghambat terbesar yang mereka alami, karena berdampak pada program yang mereka jalankan, dan dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dana sangat mempengaruhi pada proses implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, dengan dana yang terbatas pergerakan juga terbatas.

Tidak hanya Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengalami keterbatasan dana tapi masyarakat juga mengalami keterbatasan dana, keterbatasan dana yang di alami masyarakat seperti kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan terjadi di karenakan masih banyak orang tua yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap (serabutan) dan kurang dari cukup sehingga menyebabkan kurangnya asupan sehari-hari sang bayi.

4.2.3. Masyarakat Itu Sendiri

Faktor penghambat selanjutnya yang peneliti temukan adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat masih

banyak yang tidak peduli dan menganggap remeh *stunting* sedangkan sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal seperti ini dapat menghambat dari proses implementasi kebijakan, dan dapat menyebabkan tidak tercapai target atau tujuan dari kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Kemudian pola asuh anak dari masyarakat sendiri masih banyak yang kurang, pemberian makanan yang sembarangan, pola makan yang tidak teratur, pola tidur yang tidak teratur dan lain sebagainya.

4.2.4. Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk yang terjadi dari luar Kota Pekanbaru ke dalam Kota Pekanbaru ini menyebabkan naiknya jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Ketika penduduk itu pindah Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan sensus penduduk untuk mengetahui berapa anggota keluarga yang dimiliki dan dari daerah mana dia berasal. Banyak kasus dari perpindahan penduduk ini anak dari mereka yang mereka terkena *stunting* bahkan beresiko terkena *stunting*.

Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kenaikan angka *stunting* di Kota Pekanbaru, hal ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Lima Puluh saja namun juga terjadi kecamatan lainnya. Kecamatan Lima Puluh sendiri dalam rentan 2 tahun yakni tahun 2021-2022 menjadi kecamatan yang memili kasus *stunting* tertinggi di Kota Pekanbaru, namun Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sudah banyak melakukan upaya dan menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan *stunting* di wilayahnya.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan

Stunting oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022. Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara keseluruhan sudah berhasil dan baik namun belum cukup optimal, jika optimal, Kota Pekanbaru bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan mencapai target nasional. Hal ini dikarenakan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah komunikasi dalam mensosialisasikan *stunting* kepada masyarakat masih kurang maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui *stunting* dan bersikap acuh tak acuh dan menyebabkan terhambatnya untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemudian yang ke dua adalah aspek sumber daya, sumber daya staff atau pegawai yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih kurang dari segi kuantitas, sedangkan untuk kualitasnya secara keseluruhan sudah cukup baik. Dan terkait sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai.

Selanjutnya sikap pelaksana pegawai atau staff sudah cukup baik, dan untuk intensif tidak ada diberikan kepada pegawai atau staff pelaksana kebijakan, sehingga kurangnya motivasi dalam bekerja. Kemudian dalam struktur birokrasi terkait SOP itu tidak ada, Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mengikuti aturan sesuai (PERWAKO) No.134 Tahun 2021 dan (SK) yang dikeluarkan oleh WaliKota No.548. Untuk tanggung jawab dari setiap pegawai dan staff masih kurang dikarenakan masih ada yang tidak hadir dalam mengikuti agenda rapat rutin, dan masih ada pelimpahan tugas yang tidak konsisten dan masih kurangnya kesadaran untuk saling mambantu antar sesama. Dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi angka *stunting* di Kota Pekanbaru, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah tidak adanya

Strategi Komunikasi (STRAKOM) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal tersebut menyebabkan sosialisasi yang dilakukan hanya dalam skala kecil, sedangkan wilayah dan penduduk yang dimiliki Kota Pekanbaru sangat banyak, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa *stunting*.

Faktor yang kedua adalah adanya keterbatasan dana, dengan adanya keterbatasan dana, pegerakan yang dimiliki juga terbatas, seperti program kerja yang dijalankan di cukup-cukupkan agar program tetap dapat berjalan. Kemudian penyebab Strategi Komunikasi tidak dimiliki adalah karena adanya keterbatasan dana tersebut, faktor yang berikutnya adalah masyarakat itu sendiri, tidak sedikit masyarakat yang bersikap acuh dan menganggap remeh *stunting* ini. Walaupun sosialisasi dan edukasi telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari kebijakan yang telah di implementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir adalah perpindahan penduduk, dengan terjadinya perpindahan penduduk ini jumlah kasus *stunting* yang ditangani Pemerintah Kota Pekanbaru juga meningkat dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

5.2. Saran

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekanbaru Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana simpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan optimal, maka peneliti menyarankan:

Untuk Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekanbaru agar terlaksana dengan baik dan optimal maka Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan sosialisasi secara *massive* kepada masyarakat, tidak hanya di puskesmas dan posyandu tapi ditempat-tempat rame dengan cara mengadakan seminar agar lebih menarik perhatian masyarakat, dan

juga membuat video pendek terkait *stunting* dan mempublikasikannya di media masa. Untuk melakukan sosialisasi dengan maksimal para pegawai diharapkan lebih peka lagi antar sesama tidak hanya fokus terhadap tupoksi masing-masing sehingga tujuan dari kebijakan percepatan penurunan *stunting* ini bisa tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aan Komariah, D. S. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Ahyar, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan : Prinsip Dan Aplikasi* (Ed. 1, Cet). Depok: Rajawali Pers.
- Pramita, Gurning Fitriani. (2018). *Dasar Administrasi Kesehatan & Kebijakan Kesehatan Masyarakat* (Vi). Yogyakarta: K- Media.
- Creswell, W, John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Solichin Abdul Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik* (Fandy Hutari (ed.); 2nd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Trihono, Atmarita, Irawati, Utami, Tejayanti, L. N. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia Masalah dan Solusinya* (M. Sudomo (ed.); 1st ed.). Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- Skripsi:**
- Noviyanti, D, A. (2022). *Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting oleh Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. www.aging-us.com
- Ardiyanti, M. (2022). *Penggunaan Booklet Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Anemia Tentang Stunting Di Puskesmas Mlati I*. In *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Budi Anto. (2019). *KOMUNIKASI PERSUASIF MEDICAL REPRESENTATIF KEPADA DOKTER Studi Deskriptif Kualitatif Pada Medical Representatif PT. Bernofarm Area Bandung Utara* [UNIVERSITAS LANGLANGBUANA]. [https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/3510#:~:text=Menurut John W. Creswell dalam,dari masalah sosial atau kemanusiaan.](https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/3510#:~:text=Menurut%20John%20W.%20Creswell%20dalam,dari%20masalah%20sosial%20atau%20kemanusiaan.)
- Fazhira, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*.
- Juliyanti, E. K. (2022). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat*. SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD.”
- Purba, H, S. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA]. www.aging-us.com
- Umam, M, W. (2023). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72*

Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Pekalongan Skripsi.

Jurnal:

Afdira, V., & Chandra, P. S. (2023). Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PEPES) Dalam Menurunkan Angka *Stunting* Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya. In *Jurnal Administrasi Karya* <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/22%0Ahttps://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/download/22/28>

Burhanudin, M, F. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 13.

Edriani, M., & Hasibuan, R. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Di Upt Puskesmas Terjun Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Tambusai, volume 4*(Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*), 4162–4172.

Erika, N, H., Purbaningrum, D, G., C. A., & Setiani, D. A. (2023). Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 15. <http://jkjournal.com/index.php/men/article/view/78>

Nasikhah, R., & Margawati, A. (2012). Prevalensi *stunting* di Jawa Tengah kejadian tertinggi di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Nutrition College*, 1(1), 176–184. [Ejournal-s1.undip.ac.id](http://ejournal-s1.undip.ac.id)

Rosanti, L. D. A. (2023). implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang). *Journal of Civic* <http://eprints.ipdn.ac.id/12674/>

Rosha, B., Susilowati, A., Amaliah, N. and Permanasari, Y. (2020). *Risiko*

Penyebab Kejadian Stunting pada Anak. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 48(3), 169–182

Setiawan, E., Machmud, R., & Masrul, M. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian *Stunting* pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i2.813>

Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan *Stunting* Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 25. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.25-32>

Berita:

Delvi Adri. (2021). *Pemko Pekanbaru Alokasikan Rp35 Miliar untuk Penanganan Stunting.* CAKAPLAH. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/72553/2021/07/22/pemko-pekanbaru-alokasikan-rp35-miliar-untuk-penanganan-stunting#sthash.N7E6dAbR.WlmAbryz.dpbs>

Diskominfotik Kab. Bengkalis. (2023). *Diapresiasi Tim Penguji, Bupati Kasmarni Paparkan Langsung Inovasi Turunkan Stunting.* Bengkaliskab.Go.Id. <https://bengkaliskab.go.id/berita/diapresiasi-tim-penguji-bupati-kasmarni-paparkan-langsung-inovasi-turunkan-stunting>

Eko. (2023). *149 Juta Anak di Dunia Alami Stunting Sebanyak 6,3 Juta di Indonesia, Wapres Minta Keluarga Prioritaskan Kebutuhan Gizi.* PAUDPEDIA. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/149-juta-anak-di-dunia-alami-stunting-sebanyak-63-juta-di-indonesia-wapres-minta-keluarga-prioritaskan-kebutuhan-gizi?do=MTY2NC01YjRhOGZkNA==&ix=MTETYmJkNjQ3YzA=>

MC Kota Pekanbaru. (2021). *Pemko Pekanbaru Alokasikan Anggaran Rp 35 Miliar untuk Penanganan Stunting*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/551232/pemko-pekanbaru-alokasikan-anggaran-rp-35-miliar-untuk-penanganan-stunting>

Peraturan Perundang-undangan:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. (PERWAKO) Peraturan WaliKota No. 134 Tahun 2021 Tentang Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.
3. (PERPRES) Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
4. (SK) Surat Keputusan WaliKota Pekanbaru Tentang Perubahan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. (PERPRES) Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.